

## *Transparency of Website-Based Regional Financial Information in All Regency and City Governments in Jambi Province 2016-2018*

### **Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018**

**Atifa Zulfa K<sup>1\*</sup>**

**Yudi<sup>2</sup>**

**Rahayu<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

<sup>2&3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

<sup>\*</sup> Korespondensi

Email: [atifazulfa@gmail.com](mailto:atifazulfa@gmail.com)<sup>1)</sup>, [yudi\\_fe@unja.ac.id](mailto:yudi_fe@unja.ac.id)<sup>2)</sup>, [rahayu-fe@unja.ac.id](mailto:rahayu-fe@unja.ac.id)<sup>3)</sup>

#### **ABSTRACT**

*This study aims to measure the transparency of local financial information in Jambi Province by focusing on three main stages (aspects) of local financial information, namely the aspects of planning, implementation, reporting, and accountability of the budget. This research was conducted on 11 local government websites in Jambi Province. The object of this research is the local financial information in the 2016-2018 period. The methodology research is a quantitative descriptive method.*

*This type of research data is quantitative data. The data source used in this study is secondary data. The data collection techniques used were literature study and observation. The population of this research is all local government websites in Jambi Province. The sampling technique uses a non-probability sampling type. The data analysis technique used four criteria, namely availability, accessibility, timeliness, and frequency of disclosure on each indicator made by Huwae (2016). The results of the measurement are categorized by the provisions of the Open Budget Index (OBI).*

*The results showed that the level of transparency of financial information of all local governments in Jambi Province was at an insufficient level. Based on observations, it was found that most of the local governments are in the Scant or None category, while a few others are in the Minimal category. This shows that transparency is not yet a priority for local governments in Jambi Province. This research is expected to be used as a basis for thought and input for local governments in increasing the transparency of local financial information in Jambi Province.*

**Keywords:** Local Financial Information, Local Governments, Transparency, Website.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur transparansi informasi keuangan daerah di Provinsi Jambi dengan berfokus pada tiga tahapan utama (aspek) informasi keuangan daerah, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Penelitian ini dilakukan pada 11 situs web pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Jambi. Objek dalam penelitian ini adalah data informasi keuangan daerah tahun 2016-2018. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi. Populasi penelitian ini yaitu seluruh situs web Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan jenis non probability sampling. Teknik analisis data menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan pada masing-masing indikator yang dibuat oleh Huwae (2016). Hasil dari pengukuran tersebut dikategorikan sesuai dengan ketentuan Open Budget Index (OBI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi berada pada tingkat tidak cukup. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar pemerintah daerah masuk pada kategori sedikit, sedangkan sebagian kecil lainnya masuk pada kategori minimal. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Transparansi, Situs Web.

## 1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Salah satu organisasi sektor publik adalah instansi pemerintah (Mardiasmo, 2002). Sebelum era reformasi, eksekutif dan legislatif negara cenderung memiliki praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari kinerjanya (Akili, 2012). Salah satu faktor penyebab korupsi adalah kurangnya transparansi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, pemerintah Indonesia menerapkan reformasi birokrasi dalam berbagai bidang pemerintahan. Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama harus ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan pemda untuk menyiapkan menu content dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam website resmi pemda. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan

Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah (pemda), berkewajiban menerbitkan informasi publik atas setiap aktivitas yang dilaksanakannya. Serta mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dipertegas dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 07 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Diterbitkannya beberapa peraturan tersebut adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Lebih lanjut, poin 32 lampiran Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh pemda (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD menurut Kementerian Keuangan adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2018 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016–2020. Memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Salah satunya meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur Pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat. Indikator Kinerja nya yaitu Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi >2,500 dan Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi > 2,300 dapat tercapai pada tahun 2021. Pada tahun 2018, Realisasi Target kinerja menunjukkan bahwa pemerintah provinsi pada Program Pembinaan, fasilitasi, pelayanan dan tata kelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah, dengan outcome berupa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mendapat nilai diatas 2,500 yaitu 2,8385, bahkan peringkat 16 Nasional. Nilai LPPD Kabupaten/Kota juga telah mencapai target (100%) pada 11 kab/kota yang meraih nilai di atas 2,300.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016. Hasil Pemeriksaan No.22.A/LHP/XVIII.JMB/5/2017 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk

Laporan Hasil Pemeriksaan No.16.A/LHP/XVIII.JMB/6/2018, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Laporan Hasil Pemeriksaan No.24.A/LHP/XVIII.JMB/6/2019, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali pada Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendapat opini WTP dari tahun 2016-2018.

Alasan penulis melakukan penelitian pada pemerintah di Provinsi Jambi, selain karena penjelasan di atas, juga karena penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Syamsul (2016) mengenai transparansi informasi keuangan daerah terhadap seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Se-Indonesia, menunjukkan bahwa Provinsi Jambi termasuk dalam tingkat keterbukaan tidak cukup (*sufficient*) dan kategori sedikit (*scant or none*). Informasi keuangan daerah tahap perencanaan Provinsi Jambi memperoleh skor 1 atau indeks sebesar 10%. Informasi keuangan daerah tahap pelaksanaan mendapat skor 1 atau indeks sebesar 11,11%. Pada tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban kembali mendapat skor 1 atau indeks sebesar 10%. Penulis belum menemukan penelitian yang menilai tingkat dan kategori transparansi informasi keuangan daerah seluruh pemerintah daerah berbasis website Se-Provinsi Jambi.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Akuntansi Sektor Publik**

Haryanto, dkk. (2017) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sector swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2018) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

### **2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada hakikatnya APBD merupakan instrument kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa APBD disusun dengan memperhatikan prinsip pokok anggaran sektor publik yaitu, Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektifitas Anggaran dan Taat Asas.

### **2.3. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah**

Merujuk pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### **2.4. Transparansi**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau kegiatannya (Ikhwandha, 2018). Tanpa adanya keterbukaan dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan di daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi akuntabilitas. Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Shende & Bennet, 2004 dalam Nahrudin dan Tambajong, 2017).

### **2.5. Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Wilkinson (2000) menyatakan sistem informasi dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada spesifik users. UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 103 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah dituntut untuk membuka akses kepada masyarakat secara luas atas informasi keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan informasi keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari UU Nomor 33 tahun 2004 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut informasi keuangan daerah adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah dan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan yang telah diolah dan didokumentasikan haruslah dapat disajikan kepada masyarakat. Informasi tersebut juga berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

### **2.6. E-Government**

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberi kemudahan komunikasi dan

transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono dan Mulyanto, 2010).

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ritonga dan Syamsul (2016) mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dengan berfokus pada tiga tahapan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia. Data yang digunakan adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Menemukan bukti berdasarkan hasil pengamatan, bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia, dengan menggunakan data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016, masih sangat sedikit, yakni sebesar 16,84%.

Obyek penelitian Nurhadianto dan Khamisah (2019) dilakukan pada 15 website resmi pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai menggunakan content analysis dengan empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (Scant or None) atau tidak cukup transparan.

Sampel yang diambil dalam penelitian Alwahidi dan Darwanis (2019) adalah probability sampling dengan metode Slovin. Nomor sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 224 kabupaten/kota. Data dianalisis menggunakan Simple Pearson correlation method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia sebesar 18,85%. Nilai tertinggi 71% diperoleh Kabupaten Natuna dan nilai terendah sebesar 2,09 diperoleh dari 48 kabupaten/kota di Indonesia. Tingkat lokal kekayaan pemerintah dan Pendapatan BPK memiliki keterkaitan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi.

## **3. METODE**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada hasil indeks transparansi informasi keuangan daerah yang telah diukur oleh peneliti dan hasil deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan melihat tingkat transparansi daerah secara umum dan berdasarkan masing-masing indikator.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data sekunder didapatkan dari website, buku, literatur, dan artikel yang terdapat di internet. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah informasi keuangan daerah berbasis website seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang berjumlah 11 (sebelas). Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 penelitian ini. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan jenis non probability sampling. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, kurang dari 100 website.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan observasi. Penulis melakukan observasi terhadap website resmi Pemerintah daerah Se-Provinsi Jambi.

### 3.5. Teknik Analisa Data

Pada tahap perencanaan informasi keuangan daerah terdiri dari 10 (sepuluh) indikator, pada tahap pelaksanaan informasi keuangan daerah terdiri dari 9 (sembilan) indikator, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBD terdiri dari 10 (sepuluh) indikator. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lampiran Instrumen pengukuran transparansi dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dibuat oleh Huwae (2016). Dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan pada masing-masing indikator. Hasil dari pengukuran tersebut dikategorikan sesuai dengan ketentuan Open Budget Index (OBI). Berikut tabel peringkat transparansi informasi keuangan daerah mengacu pada Open Budget Index (OBI):

**Tabel 1. Transparansi Menurut *Open Budget Index***

Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor
<b>Cukup (Sufficient)</b>	Ekstensif (Extensive)	81-100
	Substansial (Substansial)	61-80
<b>Tidak Cukup (Insufficient)</b>	Terbatas (Limited)	41-60
	Minimal (Minimal)	21-40
	Sedikit (Scant or None)	0-20

*Sumber: International Budget Partnership, 2021*

Indeks transparansi informasi keuangan daerah akan dinilai dengan metode berikut:

Penilaian dilakukan pada tahap perencanaan yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator, pada tahap pelaksanaan terdiri dari 9 (sembilan) indikator, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBD terdiri dari 10 (sepuluh) indikator. Dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan. Ketersediaan menunjukkan bahwa dokumen berdasarkan indikator Huwae (2016) tersedia di website resmi pemerintah daerah (pemda). Artinya dokumen tersebut tersedia dalam menu content Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) di website. Skor 0,25 untuk informasi yang tersedia dan skor 0 untuk informasi yang tidak tersedia. Aksesibilitas berarti dokumen harus bisa diunduh secara mandiri oleh publik pada website resmi masing-masing pemda. Maka dokumen tersebut dapat dikatakan dapat diakses (aksesibilitas). Skor 0,25 untuk dokumen yang dapat diunduh dan skor 0 untuk dokumen yang tidak dapat diunduh.

Ketepatan waktu artinya dokumen yang diunggah harus diunggah secara tepat waktu berdasarkan masa tenggang pengunggahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2006. Penilaian ketepatan waktu didasarkan pada tanggal terakhir diperbaharunya informasi yang ada dalam layanan elektronik tersebut, yakni maksimal telah diperbaharui satu bulan terakhir. Adapun jika dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan waktu ketetapan, maka dokumen tersebut dianggap tidak tepat waktu. Skor 0,25 untuk dokumen yang di publish tepat waktu dan skor 0 untuk dokumen yang di publish tidak tepat waktu. Frekuensi pengungkapan dokumen berhubungan dengan ketersediaan informasi selama periode tertentu. Frekuensi pengungkapan dokumen yang dilihat dalam penelitian adalah tiga tahun, yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Bila dokumen tersedia hanya dalam satu tahun diberi skor 0,08. Dokumen tersedia hanya dalam dua tahun diberi skor 0,16. Jika dokumen tersedia dalam tiga tahun berturut-turut akan diberikan skor 0,25.

Apabila dokumen tidak tersedia dalam tiga tahun diberi skor 0. Pemerintah daerah yang tidak memiliki website resmi atau tidak dapat diakses atau dalam perbaikan, akan diberikan skor 0 atau label tidak transparan. Langkah selanjutnya adalah menjumlah skor ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan pada masing-masing indikator. Kemudian skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapat skor total pada masing-masing pemda. Menghitung tingkat transparansi dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator, kemudian dikalikan seratus untuk mendapat hasil indeks transparansi. Hasil evaluasi indeks transparansi informasi keuangan daerah, dapat dijadikan dasar untuk menentukan kategori tingkat keterbukaan pada masing-masing tahap pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil evaluasi indeks transparansi informasi keuangan daerah, dapat dijadikan dasar untuk menentukan kategori tingkat keterbukaan pada keseluruhan tahap pengelolaan keuangan daerah.

#### 4. HASIL

##### 4.1. Hasil Evaluasi Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Perencanaan

Hasil evaluasi indeks transparansi informasi keuangan daerah, seluruh website Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, untuk aspek perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Perencanaan**

Website Kota & Kabupaten	Indeks (%)		
	2016	2017	2018
Jambi	30	30	30
Muaro Jambi	0	0	0
Batanghari	16,6	9,1	9,1



Website Kota & Kabupaten	Indeks (%)		
	2016	2017	2018
<b>Tanjabt</b>	30	30	30
<b>Tanjabbar</b>	0	0	0
<b>Merangin</b>	0	0	0
<b>Sarolangun</b>	0	0	0
<b>Tebo</b>	0	0	0
<b>Bungo</b>	0	0	0
<b>Kerinci</b>	0	0	0
<b>Sungai Penuh</b>	0	0	0

*Sumber: Data diolah peneliti, 2021*

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa indeks transparansi informasi keuangan daerah pada Website Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dan Website Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabt berdasarkan aspek perencanaan, konstan pada angka 30% mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Menjadikan website Pemkot Jambi dan Pemkab Tanjabt menduduki peringkat atas perolahan indeks transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek perencanaan. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Jambi menyediakan informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD selama tiga tahun berturut-turut. Sedangkan Pemkab Tanjabt menyediakan informasi peraturan daerah tentang APBD, ringkasan DPA SKPD, dan DPA PPKD tiga tahun berturut-turut. Dari total sepuluh dokumen perencanaan yang seharusnya ada pada website resmi pemda.

Website Pemkab Batanghari pada tahun 2016 mendapat indeks 16,6% karena menyajikan informasi ringkasan dokumen RKPD, dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD pada tahun 2016. Tahun 2017 dan 2018 dua dokumen tersebut tidak lagi disediakan pada website resmi Pemkab Batanghari. Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD yang terdapat di website pemkab batanghari di tahun 2017 dan 2018. Sementara itu, Website Pemkab Muaro Jambi, Website Pemkab Tanjabbar, Website Pemkab Sarolangun, Website Pemkab Merangin, Website Pemkab Tebo, Website Pemkab Bungo, Website Pemkab Kerinci, Website Pemkab Sungai Penuh tidak menyediakan satupun dokumen terkait transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek perencanaan dari tahun 2016 sampai 2018 dan mendapat indeks 0%.

#### **4.2. Hasil Evaluasi Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaksanaan**

Hasil evaluasi indeks transparansi informasi keuangan daerah, seluruh website Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, untuk aspek pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3. Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaksanaan**

Website Kota & Kabupaten	Indeks (%)		
	2016	2017	2018
<b>Jambi</b>	33,3	33,3	33,3
<b>Muaro Jambi</b>	0	0	0
<b>Batanghari</b>	0	10,1	10,1
<b>Tanjatim</b>	10,1	10,1	0
<b>Tanjabbar</b>	0	0	0
<b>Merangin</b>	0	0	0
<b>Sarolangun</b>	0	0	0
<b>Tebo</b>	0	0	0
<b>Bungo</b>	0	0	0
<b>Kerinci</b>	0	0	0
<b>Sungai Penuh</b>	0	0	0

*Sumber: Data diolah peneliti, 2021*

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa indeks transparansi informasi keuangan daerah pada Website Pemkot Jambi berdasarkan aspek pelaksanaan, konstan pada angka 33,3% mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Menjadikan website Pemerintah Kota Jambi menduduki peringkat tertinggi perolahan indeks transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaksanaan. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Jambi menyediakan informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD selama tiga tahun berturut-turut. Tiga dari total sembilan informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaksanaan yang seharusnya disediakan pada website resmi pemda. Pemerintah Kabupaten Tanjattim mendapat indeks 10,1% karena menyediakan informasi di website resminya yaitu peraturan daerah tentang perubahan APBD di tahun 2016 dan 2017. Pemerintah Kabupaten Tanjattim tidak menyediakan dokumen tersebut pada tahun 2018. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2016 dan 2017 mendapat indeks 10,1% untuk websitenya. Dikarenakan menyajikan informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD hanya di tahun 2017 dan 2018.

Website Pemkab Muaro Jambi, Website Pemkab Tanjabbar, Website Pemkab Sarolangun, Website Pemkab Merangin, Website Pemkab Tebo, Website Pemkab Bungo, Website Pemkab Kerinci, Website Pemkab Sungai Penuh Jambi tidak menyediakan satupun dokumen terkait transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaksanaan dari tahun 2016 sampai 2018 dan mendapat indeks 0%.

#### **4.3. Hasil Evaluasi Indeks Transparansi Berdasarkan Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Hasil evaluasi indeks transparansi informasi keuangan daerah, seluruh website Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4 Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Website Kota & Kabupaten	Indeks (%)		
	2016	2017	2018
<b>Jambi</b>	0	0	0
<b>Muaro Jambi</b>	0	0	0
<b>Batanghari</b>	0	0	0
<b>Tanjabtlim</b>	24,9	0	8,3
<b>Tanjabbar</b>	0	0	0
<b>Merangin</b>	8,3	0	0
<b>Sarolangun</b>	0	0	0
<b>Tebo</b>	8,3	0	0
<b>Bungo</b>	0	0	0
<b>Kerinci</b>	0	0	0
<b>Sungai Penuh</b>	0	0	0

*Sumber: Data diolah peneliti, 2021*

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Website Pemerintah Kabupaten Tanjabtim berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, menduduki peringkat teratas perolahan indeks transparansi informasi keuangan daerah. Hal tersebut karena Website Pemerintah Kabupaten Tanjabtim mampu memperoleh indeks transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2016 sebesar 24,9% karena menyediakan informasi realisasi anggaran seluruh SKPD, laporan realisasi anggaran PPKD, serta Neraca. Tetapi penyediaan dokumen tersebut tidak berlanjut ke tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2018 memperoleh indeks transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban sebesar 8,3% karena menyediakan Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah tahun 2018. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Merangin mendapat indeks 8,3% karena menyediakan dokumen indeks transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tebo juga mendapat indeks 8,3% karena menyediakan dokumen indeks transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah. Website Pemerintah Kabupaten Tebo menyediakan menu content Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Opini BPK RI, tetapi dokumen tersebut tidak tersedia.

Website Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar, Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak menyediakan satupun dokumen terkait transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dari tahun 2016 sampai 2018 dan mendapat indeks 0%.

#### 4.4. Hasil Pengukuran Tingkat dan Kategori Keterbukaan

Hasil evaluasi indeks transparansi informasi keuangan daerah, seluruh website Pemda di Provinsi Jambi, untuk aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 5 Indeks Transparansi Informasi  
Keuangan Daerah**

Website Kota & Kabupaten	Indeks (%)		
	2016	2017	2018
<b>Jambi</b>	21	21	21
<b>Muaro Jambi</b>	0	0	0
<b>Batanghari</b>	6	6	6
<b>Tanjabt看</b>	22	14	13
<b>Tanjabbar</b>	0	0	0
<b>Merangin</b>	3	0	0
<b>Sarolangun</b>	0	0	0
<b>Tebo</b>	3	0	0
<b>Bungo</b>	0	0	0
<b>Kerinci</b>	0	0	0
<b>Sungai Penuh</b>	0	0	0

*Sumber: Data diolah peneliti, 2021*

Tabel 5 menunjukkan bahwa website Pemkab Tanjabtim memiliki indeks transparansi informasi keuangan daerah tertinggi pada tahun 2016, yakni dengan indeks sebesar 22%. Website Pemkot Jambi dengan indeks sebesar 21%. Selanjutnya website Pemkab Batanghari dengan indeks 6%. Kemudian website Pemkab Merangin dan Pemkab Tebo dengan indeks 3%. Sementara Website lain, yaitu Pemkab Muaro jambi, Pemkab Tanjabbar, Pemkab Sarolangun, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, dan Pemkot Sungai Penuh memiliki indeks terendah yaitu 0%. Pada tahun 2017 Pemkot Jambi memiliki indeks transparansi informasi keuangan daerah tertinggi, yakni dengan indeks sebesar 21%. Website Pemkab Tanjabtim dengan indeks 14%. Website Pemkab Batanghari dengan indeks 6%. Sementara Website lain, yaitu Pemkab Muaro jambi, Pemkab Tanjabbar, Pemkab Merangin, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, dan Pemkot Sungai Penuh memiliki indeks terendah yaitu 0%.

Pada tahun 2018 Pemkot Jambi kembali memiliki indeks tertinggi, yakni dengan indeks sebesar 21%. Website Pemkab Tanjabtim dengan indeks sebesar 13%. Selanjutnya website Pemkab Batanghari dengan indeks 6%. Sementara Website lain, yaitu Pemkab Muaro jambi, Pemkab Tanjabbar, Pemkab Merangin, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, dan Pemkot Sungai Penuh memiliki indeks terendah yaitu 0%. Dapat disimpulkan bahwa Pemkot Jambi konsisten memperoleh indeks transparansi informasi keuangan daerah sebesar 21% selama tiga tahun berturut-turut. Sementara Pemkab Batanghari konsisten memperoleh hasil indeks sebesar 6%. Sementara Website lain, yaitu Pemkab Muaro

jambi, Pemkab Tanjabbar, Pemkab Merangin, Pemkab Sarolangun, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, dan Pemkot Sungai Penuh konsisten memperoleh indeks terendah, yaitu 0%. Sedangkan Tingkat dan kategori keterbukaan dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6 Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Keuangan Seluruh Website Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi**

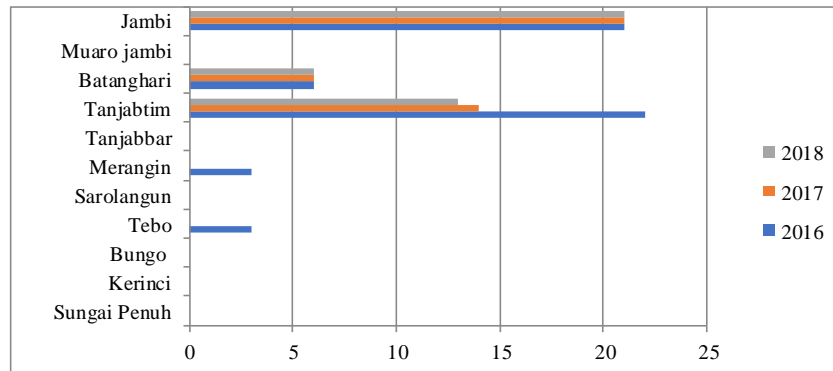
Tahun	Tingkat	Kategori	Skor	Website
2016	Cukup ( <i>sufficient</i> )	Ekstensif	81-100	
		Substansial	61-80	
	Tidak Cukup ( <i>insufficient</i> )	Terbatas	41-60	
		Minimal	21-40	Tanjabt
				Jambi
		Sedikit	0-20	Muaro Jambi
				Batanghari
				Tanjabbar
				Merangin
				Sarolangun
				Tebo
				Bungo
Kerinci				
Sungai Penuh				
2017	Cukup ( <i>sufficient</i> )	Ekstensif	81-100	
		Substansial	61-80	
	Tidak Cukup ( <i>insufficient</i> )	Terbatas	41-60	
		Minimal	21-40	Jambi
				Muaro Jambi
		Sedikit	0-20	Batanghari
				Tanjabt
				Tanjabbar
				Merangin
				Sarolangun
				Tebo
				Bungo
Kerinci				
Sungai Penuh				

Tahun	Tingkat	Kategori	Skor	Website
2017	Cukup ( <i>sufficient</i> )	Ekstensif	81-100	
		Substansial	61-80	
	Tidak Cukup ( <i>insufficient</i> )	Terbatas	41-60	
		Minimal	21-40	Jambi
		Sedikit	0-20	Muaro Jambi
				Batanghari
				Tanjabtim
				Tanjabbar
				Merangin
				Sarolangun
Tebo				
Bungo				
Kerinci				
Sungai Penuh				

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Merujuk pada IBP (2015) tentang keterbukaan, maka seluruh website Pemda di Provinsi Jambi di tahun 2016 masuk pada tingkat Tidak Cukup (*insufficient*). Terdapat dua Website pemda yang masuk kategori Minimal pada tahun 2016, yaitu Pemkab Tanjabtim dan Pemkot Jambi. Sedangkan Website Pemda lainnya, yakni Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Batanghari, Pemkab Tanjabbar, Pemkab Merangin, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, serta Pemkot Sungai Penuh, masuk pada kategori Sedikit (*Scant or None*).

Seluruh website Pemda di Provinsi Jambi di tahun 2017 dan 2018 masuk pada tingkat Tidak Cukup (*insufficient*). Terdapat satu Website pemda yang masuk kategori Minimal pada tahun 2017 dan 2018, yaitu Pemkot Jambi. Sedangkan Website Pemda lainnya, yakni Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Batanghari, Pemkab Tanjabtim, Pemkab Tanjabbar, Pemkab Merangin, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, serta Pemkot Sungai Penuh, masuk pada kategori Sedikit (*Scant or None*). Berikut bagan atau grafik Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Seluruh Pemda di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018.



**Gambar 1. Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Seluruh Website Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018**

## 5. PEMBAHASAN

### 5.1. Pembahasan Evaluasi Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Perencanaan

Pemerintah daerah yang menyajikan dokumen terkait transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan perencanaan pada website resminya, terdiri dari tiga pemda, yaitu Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari serta Pemerintah Kabupaten Tanjabtim. Website Pemerintah Kota Jambi menyediakan tiga dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan perencanaan yang sama dari tahun 2016-2018, yaitu Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, serta rancangan APBD.

Pemerintah Kabupaten Batanghari menyediakan dua dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan perencanaan pada tahun 2016, dimana pada dokumen RKPD terdapat informasi ringkasan dokumen RKPD serta Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Tahun 2017 dan 2018 dua dokumen tersebut tidak lagi disediakan pada website resmi Pemkab Batanghari. Pada tahun 2017 dan 2018 dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan perencanaan adalah Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD yang terdapat di website pemkab batanghari Pemkab Tanjabtim menyediakan 3 dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan perencanaan yang sama dari tahun 2016-2018, yaitu Perda APBD, DPA SKPD dan DPA PPKD.

### 5.2. Pembahasan Evaluasi Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaksanaan

Pemerintah daerah yang menyajikan dokumen terkait transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan pelaksanaan pada website resminya, terdiri dari tiga pemda, yaitu Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari serta Pemerintah Kabupaten Tanjabtim. Website Pemerintah Kota Jambi menyediakan tiga dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan pelaksanaan yang sama dari tahun 2016 sampai dengan 2018, yaitu Perda Perubahan APBD, Perkada Perubahan APBD, serta

Perubahan APBD. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyediakan dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan pelaksanaan pada tahun 2017 dan tahun 2018, yaitu dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dimana dokumen tersebut tidak tersedia pada tahun 2016 di website resmi Pemerintah Kabupaten Batanghari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyediakan dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan pelaksanaan yang sama pada tahun 2016 dan tahun 2017, yaitu dokumen Rancangan Perubahan APBD. Dimana dokumen tersebut tidak tersedia pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 di website resmi Pemerintah Kabupaten Tanjabtim.

### **5.3. Pembahasan Evaluasi Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pemerintah daerah yang menyajikan dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada website resminya, terdiri dari tiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Tanjabtim, Pemerintah Kabupaten Merangin serta Pemerintah Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Tebo menyajikan dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban hanya pada tahun 2016. Dimana Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyediakan tiga dokumen dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2016, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Neraca. Serta pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyajikan satu dokumen dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan APBD. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Merangin menyediakan satu dokumen dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2016, yaitu Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyediakan satu dokumen dokumen transparansi informasi keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2016, yaitu Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.

### **5.4. Pembahasan Terkait Pengukuran Tingkat dan Kategori Keterbukaan**

Website Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh baru mulai menyajikan dokumen terkait transparansi informasi keuangan daerah pada tahun 2019. Website Pemerintah Kabupaten Bungo menyajikan dokumen transparansi hanya pada tahun 2015. Sedangkan Tanjabbar tidak menyajikan satupun dokumen transparansi informasi keuangan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 103 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah dituntut untuk membuka akses kepada masyarakat secara luas atas informasi keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan informasi keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Begitu pula dengan Informasi keuangan daerah yang tertuang dalam PP Nomor



56 tahun 2005 pasal 4 pada pelaksanaannya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah.

Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Sarana yang paling efisien dalam menyampaikan informasi keuangan adalah dengan menggunakan internet sebagai media penyampaiannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan situs resminya sebagai media publikasi informasi keuangan sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Publikasi informasi keuangan daerah pada website resmi telah dilakukan oleh semua pemerintah daerah di provinsi jambi kecuali Pemerintah Kabupaten Tanjabbar, yang tidak menyediakan satupun dokumen mengenai informasi keuangan daerah, karena situs tersebut tidak menyediakan menu content Transparansi Anggaran serta website resminya hanya terdiri atas berita Pemerintah Kabupaten Tanjabbar. Intruksi Presiden No. 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* mengintruksikan kepada masing-masing instansi di bawah naungan pemerintah baik pusat maupun daerah agar membuat sebuah situs website. Dimana seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Telah memilikinya dan menggunakannya untuk menyediakan informasi terkait Pemerintah Daerah masing-masing.

## **6. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian, disimpulkan hasil penelitian bahwa seluruh Website Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, masuk pada tingkat Tidak Cukup (insufficient). Website Pemerintah Kota Jambi masuk kategori Minimal selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2016 sampai 2018 dengan indeks 21%. Website Pemerintah Kabupaten Tanjabtim masuk kategori Minimal pada tahun 2016 dengan indeks 22%. Pemerintah Kabupaten Batanghari konsisten selama tiga tahun berturut turut dalam menyediakan informasi keuangan daerah pada wesite resmi, walaupun masih dalam kategori Sedikit dengan indeks 6%.

Sementara Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pemerintah Kabupaten Merangin hanya menyediakan satu dokumen di website resminya pada tahun 2016 dengan kategori Sedikit dengan indeks 3%. Sedangkan Website pemerintah daerah lainnya, yakni Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Kabupaten Kerinci, serta Pemerintah Kota Sungai Penuh, masuk pada kategori Sedikit (Scant or None) karena tidak menyediakan informasi keuangan daerah pada website resminya selama tahun 2016 sampai dengan 2018.

Penulis berharap semoga dokumen yang disediakan di website resmi semakin banyak. Dokumen pada tahun 2019 dan seterusnya semakin lengkap. Jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam menyediakan dokumen di website resmi bertambah. Serta pemda dapat lebih konsisten dalam menyiapkan dokumen di website resmi dari tahun ke tahun. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Afandi, A., Indrawan, A. K., & Rachmat, B. 2017. *Analisis APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur: Malang*.
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. 2019. *Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153-161.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 2016. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016. Diakses pada 24 Desember 2020. <https://jambi.bpk.go.id/lkpd-tahun-anggaran-2016-wtp/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 2017. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Diakses pada 24 Desember 2020. <https://jambi.bpk.go.id/lkpd-provinsi-jambi-tahun-anggaran-2017-wtp/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 2018. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Diakses pada 24 Desember 2020. <https://jambi.bpk.go.id/lkpd-provinsi-jambi-tahun-anggaran-2018-wtp/>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. 2019. *Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi 2019*. Diakses pada 24 Desember 2020. [https://jambiprov.go.id/files/LKj\\_Jambi\\_2019.pdf](https://jambiprov.go.id/files/LKj_Jambi_2019.pdf)
- Bastian, I. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Biduri, S. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Brown, D. 2005. *Electronic government and public administration. International Review of Administrative Sciences*, 71(2), 241-254.
- Chalid, P. 2005. *Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi: tantangan dan hambatan*. Jakarta: Kemitraan.
- Ferdinand, A. Tae. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit
- Ginjar, T. 2014. *Rahasia Membangun Website Toko Online Berpenghasilan Jutaan Rupiah*. Jakarta: Iffahmedia.
- Nurhadianto, T. & Khamisah, N. 2019. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jurnal Technobiz Vol.3, No. 5, 25-30*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. 2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9-21.
- Haryanto, dkk. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huwae, K. 2016. *Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*.

- International Budget Partnership (IBP). 2015. *Budget Brief No. 5-The Transparency Gap: Resource-Dependent Countries Perform Poorly on Open Budget Index*. Diakses pada 8 Desember 2020. <https://www.internationalbudget.org/publications/brief5/>
- Ikhwandha, M. F. 2018. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat*.
- Kawedar, W. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi, 2*.
- Kuncoro. M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. PT Gelora Aksara Pratama*. Jakarta: Erlangga.
- Latief, F., & Mutiarin, D. 2016. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014*. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 245-262.
- Mangkunegara, A. A. 2011. Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Medina, F. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di indonesia*. Universitas Indonesia.
- Mulyono, S. 2003. *Statistika Untuk Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nahrudin, Z., & Tambajong, H. 2017. *The Behavior of Apparatus and Cultural Organization in Provision of Public Service in District Level*.
- Nosihana, A., & Yaya, R. 2016. *Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di indonesia*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 89-104.
- O'brien, J. A., & Marakas, G. M. 2011. *Management information systems (Vol. 9)*. McGraw-Hill/Irwin.
- Pinatik, S., & Pangkey, I. 2015. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 2801.
- Republik Indonesia. 2010. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses pada 15 Desember 2020. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri Nomor 188 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Republik Indonesia. 2007. Permenpanrb Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Diakses pada 1 Desember 2020. Jakarta: KSAP. Diakses pada 8 Desember 2020. [http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/08/Buku-SAP-2019\\_tanpa-logo\\_web1.pdf](http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/08/Buku-SAP-2019_tanpa-logo_web1.pdf)
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. 2016. *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 20(2), 110.
- Rora, P. S. 2010. *Pengaruh kinerja, tingkat ketergantungan dan karakteristik penda terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada situs pemda tahun 2010*. *Skripsi Sarjana FEUI*.
- Sandi, P. 2020. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan Good Governance Provinsi Se-Sumatera (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang)*.
- Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. 2018. *Laporan Kinerja 2018*. Diakses pada 15 Desember 2020. <http://web.jambiprov.go.id/assets/skpd/ biro-pemerintahan/download/COVER-dikonversi.pdf>
- Siregar, H. O., & Muslih, M. 2018. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI)*. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 161-172.
- Siregar, S. 2013. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, S. 2017. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, H., & Yuswadi, H. 2016. *Akuntabilitas, Transparansi Dan Kinerja Upk Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan. Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 14(1), 1-7.
- Wantu, F. M., Akili, R., & Ahmad, I. 2012. *Psikologi Anti Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wilkinson. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Winarni, E. W. 2011. *Penelitian Pendidikan. Bengkulu*. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB.